

SEBAB-MUSABAB PEMBENTUKAN PRRI

Oleh : Prof. Dr. R. Z. Leirissa

LL

Pendahuluan

PRRI adalah konvergensi dari dua bentuk kepentingan. Pada satu pihak terdapat keinginan yang sangat kuat di kalangan daerah-daerah untuk meningkatkan taraf hidup melalui pembangunan. Pada pihak lain terdapat kepentingan untuk membangun kekuatan untuk membendung komunisme. Pihak pertama adalah daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya alam tetapi penduduknya tidak dapat menikmatinya, dan menyalahkan keadaan itu pada munculnya komunisme yang memiliki program ekonomi yang membahayakan. Pihak kedua adalah Amerika Serikat yang melihat meningkatnya kekuatan komunis di Indonesia (PKI) sebagai ancaman bagi mekanisme pasar bebas sebagai bentuk ekonomi yang bisa menjamin kesejahteraan umat manusia.

Secara metodologis PRRI adalah suatu bentuk "*collective action*". Mempelajari PRRI sebagai "*collective action*" berarti mencari sebab-musabab (*casual factor*) PRRI dengan titik pusat pada "*polity*" dan "*mobilisasi*" (Tilly 1978). Namun karena PRRI sesungguhnya adalah konvergensi dari dua kepentingan yang berbeda, maka "*polity model*" dari Tilly perlu disesuaikan dengan data empiris. Dalam hal ini kita tidak lagi berhadapan dengan satu negara-bangsa saja, tetapi suatu interaksi antar negara-bangsa ("*community of nation-states*").

Melalui pendekatan tersebut di atas, makalah ini mencoba mengemukakan sebab-musabab (*casual factor*) munculnya PRRI di tahun 1958. Maka yang menjadi perhatian adalah (a) kepentingan-kepentingan yang berkonvergensi tersebut, (b) PRRI sebagai suatu organisasi perjuangan, dan (c) mobilisasi sumberdaya yang dilakukan PRRI untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut di atas.

Pergolakan Daerah

Pergolakan daerah, terutama di Sumatra dan Sulawesi, menunjuk pada adanya kepentingan-kepentingan dari kalangan masyarakat tertentu yang belum terwujud. Atau, seperti dirumuskan dalam Piagam Permesta ada "Bengkalai Revolusi Nasional Indonesia" (Leirissa 1997:85). Bentuknya tentu saja berbeda-beda diberbagai belahan Sumatra dan berbagai belahan Sulawesi, bahkan di seluruh Indonesia (Leirissa, op.cit. hlm. 8-124). Dalam keadaan itu masyarakat yang bersangkutan menilai, bahwa birokrasi tidak sanggup mengatasi keadaan, sehingga inisiatif beralih pada eksponen-eksponen militer di setiap daerah. Maka dalam tahun 1956 dan 1957, berturut-turut muncul Dewan Banteng (Sumatera Tengah), Dewan Gajah (Sumatera Utara), Dewan Garuda (Sumatera Selatan), Dewan Lambungmangkurat (Kalimantan Selatan), Komando Perdamaian Nasional atau Kopernas (Jawa Barat), dan Perjuangan Semesta atau Permesta (Indonesia Timur).

Perkembangan politik dalam tahun-tahun itu mengarah pada polarisasi pusat daerah dan memerlukan tindakan-tindakan luar-biasa untuk mengatasinya. Maka dalam bulan September (10-13) 1957 Perdana Menteri Djuanda menyelenggarakan Musyawarah Nasional dengan menghadirkan semua jajaran pemerintahan dan militer, termasuk "para perwira pembangkang" itu. Di sini masalah-masalah politik ditangani, termasuk dibentuknya "Panitia Tujuh" untuk menilai para "perwira pembangkang". Sebulan kemudian menyusul Musyawarah Pembangunan Nasional untuk menangani masalah-masalah ekonomi. Namun Munas maupun Munap ternyata tidak bisa menyelesaikan polarisasi yang menjurus pada konflik pusat daerah itu. Hal itu berkaitan dengan "Peristiwa Cikini" tanggal 30 November 1957 atau percobaan pembunuhan Presiden Soekarno untuk sekian kalinya. Tidak dapat dipastikan sampai sekarang siapa yang mendalangi peristiwa tersebut di atas, tetapi yang jelas adalah bahwa pemerintah maupun pimpinan TNI menyalahkannya pada para "perwira pembangkang". Maka rujukan menjadi buyar dan masing-masing pihak saling mengawasi.

Para "perwira pembangkang" yang dijadikan kambing hitam itu yakin, bahwa tindakan kekerasan atau penangkapan akan dikenakan pada mereka, dan yang divonis sebagai pengkhianat biasanya mendapat hukuman yang sangat berat, sampai penyiksaan dan kematian. Maka

serangkaian rapat evaluasi pun diselenggarakan di Sumatra Barat. Terpenting di antaranya adalah yang diselenggarakan di Sungai Dareh pada tanggal 9 dan 10 Desember 1957 (Leirissa op.cit:125-126; Kahin op.cit:123-149).

Pertemuan Sungai Dareh antara lain menghasilkan suatu wadah baru yang menyatukan berbagai daerah yang bergolak di Sumatra dan Sulawesi yang dinamakan Dewan Perjuangan. Dalam jajaran kepemimpinan Dewan Perjuangan yang dipimpin Ahmad Husein dari Dewan Banteng itu terdapat juga wakil-wakil dari Dewan Gajah dan Permesta serta para politisi Masyumi yang menyingkir ke Padang, antara lain Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Namun nampaknya Sungai Dareh juga membicarakan soal-soal yang menyangkut pertahanan, yang dilakukan dalam rapat tertutup pada hari pertama dimana satu-satunya tokoh sipil yang hadir adalah Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo. Apa yang dibicarakan dalam pertemuan tertutup itu tidak terlalu jelas. Namun apabila kita membaca analisis suami-istri Kahin mengenai PRRI/Permesta dan campurtangan pemerintah Eisenhower (Kahin, op.cit. hlm:115-118), maka kita bisa menerka bahwa pembicaraannya menyangkut peran Amerika Serikat yang nampaknya dikemukakan oleh Prof. Soemitro. Dengan demikian muncullah bentuk kepentingan kedua, yang nampaknya di Sungai Dareh itu sudah mulai berkonvergensi dengan kepentingan pertama. Apakah kepentingan kedua itu?

Kepentingan Kedua

Kepentingan kedua adalah kepentingan Amerika Serikat untuk mempertahankan sistem ekonomi bebas dengan cara membendung komunisme yang membawa konsep "ekonomi komando" yang dapat merusak kehidupan antar negara. Sebab itu tidak mengherankan kalau berbagai negara lain yang bersekutu dengan Amerika Serikat secara tidak langsung juga terlibat dalam aksi Amerika itu.

Bagaimana timbul dan wujud kepentingan itu dijelaskan dengan baik sekali dalam buku dari suami-istri Kahin tersebut di atas (1997). Inisiatif diambil oleh Menlu John Foster Dulles, tetapi dilontarkan oleh National Security Council yang dipimpin Presiden Eisenhower itu, untuk membentuk suatu panitia khusus untuk merancang kegiatan yang dirahasiakan (covert operation). Panitia itu, "Interdepartemental Ad Hoc

Committee on Indonesia", dipimpin oleh seorang dutabesar di Indonesia, Hughs S. Cumming, dengan wakil-wakil dari Departemen Luar Negeri (Howard P. Jones) Angkatan Laut (Laksamana Arleigh Burke), Departemen Pertahanan dan National Security Council (Kahin op.cit.hlm. 113-122).

Kepentingan Amerika Serikat itu, menurut perkiraan rancangan panitia tersebut, dapat tercapai apabila (1) kemampuan militer daerah-daerah bergolak (terutama di Sumatra dan di Sulawesi) diperkuat, dan (2) apabila kekuatan-kekuatan anti-komunis dan non-komunis di Jawa dapat diketahui dan didukung. Kegiatan pertama dilakukan oleh CIA dan Angkatan Laut, dan kegiatan kedua dilakukan oleh perwakilan Amerika Serikat di Jakarta.

Kegiatan militer dari "covert operation" tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Oktober 1957. Kegiatan itu memungkinkan sejumlah perwira pembangkang mengadakan kontak dengan pejabat-pejabat CIA di Jakarta, bahkan juga dengan kantor CIA di London. Armada ke-7 yang berpangkalan di Teluk Subik (Filipina) juga memberi dukungan konkret dengan mengirim sebuah Satuan Tugas yang terdiri atas kapal-kapal perang dan satu divisi marinir di Singapura untuk berjaga-jaga kalau bantuannya diperlukan. Pengiriman pertama pada awal Desember gagal karena pihak Inggris, yang sedang menghadapi kemelut politik di jajahannya itu, tidak memberi izin. Upaya kedua (Task Force 75) berhasil tiba di Singapura, namun tidak pernah memberi bantuan tempur kepada PRRI di Sumatra, karena Pekanbaru yang direncanakan sebagai basis operasi telah diduduki pasukan pusat sebelumnya (Kahin, loc.cit).

Kegiatan diplomatik dari "covert operation" itu baru mulai dilaksanakan pada awal Maret 1958, ketika persiapan-persiapan militer dianggap telah rampung. Howard P. Jones, salah seorang anggota panitia perancang "covert operation" itu, dijadikan Dutabesar. Ia lalu mengadakan hubungan-hubungan dengan berbagai tokoh politik di Jakarta untuk meyakinkan dirinya, bahwa mereka bersedia menjadi benteng terhadap komunisme. Terutama tokoh-tokoh militer memberi harapan pada Jones, seperti Nasution, Gatot Soebroto, Kosasih, Mokoginta, Sarbini, Soeharto, dan Andi Jusuf. Keyakinan itu dilaporkannya kepada Washington pada tanggal 15 April, dengan saran agar Amerika Serikat mengusahakan penghentian pertempuran antara kedua belah pihak yang sesungguhnya tidak berbeda haluan (Jones 1971:125-127).

Pembentukan PRRI

Seperti dikemukakan di atas PRRI adalah konvergensi dari dua kepentingan yang berbeda, pada satu pihak daerah-daerah bergolak, pada pihak lain Amerika Serikat. Sebab itu memang mudah sekali menuduh bahwa PRRI adalah suatu ciptaan asing, suatu gerakan seperatisme. Namun perspektif sejarah semacam itu muncul karena tidak lengkapnya data maupun analisis mengenai kepentingan kedua yang berbaur dengan kepentingan pertama tersebut di atas.

Pembentukan PRRI adalah murni inisiatif para pemimpin di daerah-daerah bergolak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan strategis mereka sendiri. Nampaknya paling kurang sejak Sungai Dareh (Desember 1957) para pemimpin militer di daerah-daerah bergolak itu yakin, bahwa hanya dengan bekerjasama secara intensif dengan pihak Amerika Serikat mereka bisa bertahan terhadap ancaman penangkapan dari pusat, sementara tokoh-tokoh politik seperti hatta diharapkan akan menyelesaikan masalah secara damai di Jakarta. Namun ketika mereka menyadari bahwa bantuan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat itu bisa menimbulkan perang dengan pusat, maka mereka beranggapan bahwa wadah yang tersedia, yaitu Dewan Perjuangan, tidak memadai lagi. Pada tahapan seperti itu para pemimpin di daerah-daerah bergolak memerlukan suatu institusi legal dan formal agar masyarakat tidak menganggap gerakan mereka itu sebagai suatu gerakan liar (Leirissa op.cot hlm.189-193). Bukankah secara normatif hanya negara, yang diwakili oleh pemerintah, yang memiliki monopoli atas penggunaan senjata dalam masyarakat?. "Ultimatum" (sebetulnya yang menggunakan istilah ultimatum adalah pihak pusat), yang disiarkan melalui RRI Padang sesungguhnya merupakan bagian dari overt operation" lainnya (diplomasi), dimaksud untuk mengajak elemen-elemen non-komunis di Jakarta menggalang kekuatan bersama dalam bentuk suatu kabinet baru. Namun karena ajakan itu di tolak oleh Jakarta, maka Dewan Perjuangan mengambil inisiatif untuk membentuk sendiri pemerintah tandingan yang anti-komunis di Padang. Penolakan Jakarta dapat dimengerti apabila disadari bahwa Presiden Soekarno mempunyai suatu obsesi untuk mewujudkan konsep Nasakomnya. Bahkan jawaban Jakarta adalah pemecatan sejumlah perwira dan pemboman Padang dan Manado.

Perang antara PRRI dan pemerintah Jakarta berkecamuk sejak

bulan Maret 1958 hingga Agustus 1961. Perlawanan PRRI jelas hanya dimungkinkan karena adanya bantuan senjata dari pihak Amerika Serikat yang mengalir sejak Oktober 1957 dan makin hari makin meningkat hingga pertengahan 1958. Hanya melalui bantuan itu PRRI dapat bertahan.

Padang dan Bukittinggi jatuh dalam bulan April 1958 setelah perlawanan frontal selama sekitar sepuluh hari. Melalui radiogram pimpinan PRRI mendelegasikan pimpinannya kepada Kol. Warouw yang dijadikan Wakil Perdana Menteri PRRI. Perlawanan frontal masih diberikan di Minahasa oleh pasukan-pasukan Permesta. Namun mulai bulan Mei 1958 bantuan besar-besaran dari pihak Amerika Serikat pada pihak PRRI dihentikan samasekali. Secara politis hal itu berkaitan dengan tangkapnya Allan Pope, penerbang CIA, yang ditembak jatuh di Ambon pada tanggal 18 Mei. Hanya dengan bantuan CIA di Filipina dan di Taiwan dalam skala yang jauh kecil Permesta masih dapat terus bertahan hingga 1961. Perdamaian baru tercapai ketika Presiden Soekarno mengumumkan amnesti kepada tokoh-tokoh sipil dan militer dari PRRI pada tanggal 17 Agustus 1961 (Kahin op.cit.hlm.215-254).

Kesimpulan

PRRI perlu dibentuk pada tahapan perjuangan daerah-daerah ketika timbul kemungkinan untuk berperang (*"collective action"*) melawan pemerintah Jakarta. PRRI sebagai badan pemerintahan memberi legalitas bagi para "perwira pembangkang" untuk menggunakan senjata tanpa akan dituding sebagai pasukan liar. Pembentukan Dewan Perjuangan sebelumnya (Desember 1957) dimaksud sebagai upaya dewan-dewan untuk meningkatkan mobilisasi sumberdaya, terutama senjata, dari pihak Amerika Serikat. Kedua institusi itu, Dewan Perjuangan dan PRRI berbeda walau tumpang-rindih.

Ditinjau dari sudut sejarah sosial, pergolakan di daerah-daerah dalam tahun-tahun 1950-an itu adalah manifestasi dari munculnya suatu kekuatan sosial baru dalam tubuh bangsa Indonesia yang memperjuangkan legitimasinya diantara elemen-elemen kelas menengah lainnya yang telah tumbuh sejak awal abad ke-20 ("kelas priyayi"). Namun baru sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966 kekuatan sosial baru itu (dalam hal ini militer) menjadi bagian integral dari perpolitikan

Indonesia saat itu. Tetapi karena hakekat dari kekuatan sosial baru itu adalah kekuatan senjata, maka tidaklah mengherankan kalau sepanjang sejarah Orde Baru dominasi kekuatan sosial ini menyebabkan elemen-elemen lainnya dari kelas menengah Indonesia menjadi terdesak. Apakah dengan berakhirnya resim Orde Baru elemen-elemen lainnya akan dapat berperan dengan wajar adalah suatu hal yang belum bisa dipastikan sekarang. Namun bisa dipastikan, bahwa keadaan itu hanya bisa terwujud dalam suatu tatanan yang demokratis.

Referensi

Payun Bangun. *Kolonel Maludin Simbolon. Liku-liku Perjuangannya Dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta : Penerbit Sinar Harapan 1996.

Barbara Sillers Harvey. *Permesta : Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta : Grafitipers 1984 (terjemahan)

Howard P. Jones. *Indonesia : The Possible Dream*. Singapore : Ayu Mas pte.Ltd.1971.

Audry R & George McT. Kahin. *Subversion as Foreign Policy. The Secret Eisenhower and Dulles Decable in Indonesia*. New York : The New Press 1995.

Audry R & George McT. Kahin. *Subversi sebagai Politik Luar Negeri. Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta : Grafitipers 1997 (terjemahan terbitan 1995)

R. Z. Leirissa. *PRRI-Permesta : Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta : Grafitipers 1997 (cetakan ke-3)

R. Z. Leirissa, "PRRI-Permesta : Tinjauan Historiografis", Makalah pada Seminar Sehari "50 Tahun Hubungan Indonesia-Amerika Serikat", Depok 21 April 1998.

E. Mathindas & Bert Supit. *Ventje Sumual : Menatap Hanya ke Depan. Biografi Seorang Patriot. Filsuf, Gembong Pemberontak*. Jakarta : Penerbit Bina Insan 1998.

Charles Tilly. *From Mobilization to Revolution*. Addison-Wesley Publ Co. 1978.

